

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI DAN UKM
PUBLIKASI HARIAN

Rabu, 22 Oktober 2025

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT melakukan terobosan; pelaksanaan semacam pendidikan dan pelatihan atau bimbingan diikuti semua ASN DiskopUKM Provinsi NTT. Tujuan akhirnya adalah pengetahuan dan keterampilan tentang perkoperasian dan UKM. Pengetahuan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan, tentang hal-hal prinsipil, tentang standar dan target kerja dan tentang konsep ilmiah yang terkait perkoperasian dan UKM. Materi-materi dimaksud, telah dilaksanakan sejak Maret 2025 di awal setiap hari kerja selama setengah atau satu jam. Apa yang dilaksanakan pada Rabu, 22 Oktober 2025 itu adalah semacam “pembulatan” materi dalam rangka “formalisasi” berupa pemberian sertifikat atau keterangan kepada peserta yang mengikuti yaitu ASN Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari kerja Jam 07.30 Wita - 6.00 Wita termasuk makan siang. Moderator adalah Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan pemateri adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dr. Drs. Jusuf Lery Rupidara, M.Si; Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Filipe Lelo Bere, SE,MM; Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Drs. Thobias A. Messakh,M.Si; PJFPK Selestino Savio SE; Nelciana Yulita Soruh SE, M.Ak; Mahyani SPi,M.Si; Afrina Kaho, SH,MH. Dalam arahan pembukaan, Kadis mengemukakan arti pentingnya sumber daya manusia sebagai inti pembangunan melalui potensi-potensi yang ada dalam diri manusia, peranan sumber daya manusia dalam pembangunan, perbandingan-perbandingan praktisnya di berbagai negara yang menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah kata kunci pembangunan. Penguasaan standar legal, rasional juga etis dan

praktis operasional adalah hal penting yang memastikan DiskopUKM Provinsi NTT berfungsi dengan baik. Mengingatkan peserta akan keberadaan koperasi dan UKM sebagai tulang punggung perekonomian riil masyarakat, daerah, bangsa dan negara. Mengingatkan hal tingginya ekspektasi masyarakat dan daerah terhadap peranan pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor koperasi dan UKM; mengingatkan masih terdapatnya sejumlah masalah yang menyebabkan kurang berkembang baiknya koperasi dan UKM sementara koperasi dan UKM itu sendiri potensial menjadi sumber pendorong kemajuan masyarakat dan daerah. Kadis dengan serius menggugah peserta untuk selalu mengisi dan memastikan dirinya sebagai yang memiliki secara cukup pengetahuan dan ketrampilan praktis operasional agar tugas pokok dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik. Kita semua sudah digaji dan merupakan pilihan bebas kita sendiri tanpa paksaan menjadi ASN. Ingat, koperasi dan UKM itu tugas mulia, ingat, masyarakat dan daerah kita punya ekspektasi yang tinggi terhadap pemerintah, ingat, daerah kita dalam berbagai hal masih tertinggal, ingat, kesejahteraan masyarakat masih belum terwujud dengan baik, dan ingat pula, masyarakat dan daerah kita ini sesungguhnya punya banyak potensi dan juga punya keinginan yang kuat untuk menjadi maju dan lebih maju. Ikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin, dengan sesenang hati mungkin, jangan sekadar ikut, ini terobosan dengan maksud dan tujuan yang mulia, demikian arahan Kepala Dinas. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber yang telah ditunjuk dilanjutkan dengan diskusi. Terobosan ini adalah suatu bentuk inisiatif tanpa didanai dan diprogramkan secara resmi dalam RKA dan DPA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT. Kegiatan ini berjalan lancar dan kembali ditutup oleh Kepala Dinas pada Jam 16.00 Wita. Kadis merangkai kembali inti dari setiap materi yang disampaikan narasumber. Ini hanyalah

dorongan atau rangsangan, ini hanyalah salah satu yang dapat kita lakukan bukan satu-satunya. Tanam, rawat, kembangkan sendiri semua yang sudah diperoleh, teruslah belajar, *knowledge is power*, pengetahuan adalah kekuatan, pengetahuan adalah kekuasaan, pengetahuan adalah kewibawaan dan pengetahuan adalah model pertanggungjawaban kita, tidak hanya kepada masyarakat dan daerah, bangsa dan negara tetapi juga kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, demikian arahan penutup yang dilanjutkan dengan doa yang dipimpin sendiri oleh Kadis.

Kamis, 23 Oktober 2025

Kadis memimpin diskusi yang dihadiri semua ASN Diskop UKM. Membahas tulisan yang disusun langsung oleh Kadis dengan judul “Koperasi dan Perekonomian NTT”. Adapun isi tulisan dimaksud, sebagai berikut.

Tidak hanya lapangan usaha pertanian yang menentukan perekonomian NTT, sektor lain juga. **Koperasi**. Wujud pelembagaan atas apa yang disebut modal sosial; jenis modal yang menjanjikan. Modal yang bersumber dari hubungan antar manusia yang berwujud spontanitas, kepercayaan, kerja sama dan rasa saling peduli. Wujud investasi sosial. Pengeluaran atau penanaman modal dalam arti luas, tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan finansial, tetapi memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Jika investasi biasa itu fokus ke profit (keuntungan uang), investasi sosial fokus ke *impact* (dampak sosial positif) misalnya mengurangi kemiskinan dan ketergantungan pada sektor formal, meningkatkan pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan. Investasi sosial tidak menghasilkan *return* langsung tapi dalam jangka panjang. Koperasi : wadah investasi bersama untuk tujuan bersama, dengan prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

Dari segi jenis, koperasi dibedakan atas : produsen, konsumen, pemasaran, jasa, simpan pinjam. Pointnya adalah bahwa semua jenis koperasi ini ada di NTT dengan histori, literasi dan material. Koperasi konsumen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Koperasi produsen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana, pemasaran, dan faktor produksi serta pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Koperasi jasa, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Koperasi pemasaran,

menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan anggota dan non-anggota. Koperasi simpan pinjam, menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Jumlah unit kelembagaannya? Konsumen 1.590 unit; simpan pinjam 1.219 unit; produsen 593 unit; jasa 216 unit, pemasaran 78 unit. Jenis koperasi konsumen adalah yang terbanyak 43,23% dan simpan pinjam 33%. Jenis-jenis koperasi tersebut menjelaskan perekonomian : barang dan jasa, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan lainnya dengan prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerja sama antar koperasi. Unik : anggota adalah pemilik sekaligus pengguna.

Per Maret 2025, jumlah koperasi di Provinsi NTT adalah 3.678 unit dengan jumlah anggota 1.330.314 orang, angka ini terus berkembang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk NTT tahun 2024 yaitu 5.656.039 orang maka jumlah anggota koperasi adalah 23,05%. Total aset koperasi adalah 27,397 trilyun rupiah. Jika dibandingkan dengan PDRB NTT tahun 2024, kiranya tidak keliru, sebesar 137,2 trilyun rupiah maka kontribusi koperasi adalah 20,2%. Memang masih terselib pertanyaan terkait kualitas dan juga kuantitas, hal ini menjadi perhatian pemerintah, melalui beberapa program : pembinaan, pemberdayaan, uji kepatutan dan kelayakan, pengawasan, pemeriksaan kesehatan, digitalisasi dan lainnya. Tertuju pada tiga aspek : kelembagaan, tata kelola dan usaha serta keuangan koperasi. Aksi nyatanya memang masih terbatas tetapi target akhirnya *on the track* : bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengurus, pengawas, pengelola, anggota; kepatutan dan kelayakan, kelembagaan, tata kelola, usaha dan keuangan, pencapaian rasio/standar perkoperasian; peningkatan jumlah anggota; peningkatan aset, digitalisasi dan lainnya.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Di NTT, berjumlah 3.442 unit sehingga total koperasi secara umum adalah 7.138 unit. Analisis sederhana atas KDMP/KKMP di Provinsi NTT itu, dilakukan misalkan oleh Kepala Bapperida NTT dan Dinas KopUKM NTT, sebagai berikut. Diukur dari tiga indikator : peningkatan pendapatan rumah tangga desa; perubahan nilai tukar petani (NTP); dan berkurangnya ketergantungan pada ijon, rentenir dan tengkulak. Kepala Baperida menggunakan tiga skenario : konservatif, moderat dan optimis, Dinas Koperasi dan UKM menambah dengan skenario agresif. Jika rata-rata rumah tangga per unit (asumsi) = 150 KK/unit dan total rumah tangga di NTT maka 3.442 dikalikan 150 = 516.300 KK. Dengan baseline pendapatan rata-rata per rumah tangga = Rp.18.000.000 /tahun.

Berdasarkan skenario adopsi dan peningkatan pendapatan dengan skenario **konservatif**, 30% rumah tangga diuntungkan dengan kenaikan pendapatan 10%. Berdasarkan skenario **moderat**, 60% rumah tangga diuntungkan dengan kenaikan 20%. Berdasarkan skenario **optimis**, 90% rumah tangga diuntungkan dengan kenaikan 35%. Berdasarkan skenario **agresif**, 95% rumah tangga diuntungkan dengan kenaikan 40%. Berdasarkan perhitungan peningkatan **pendapatan rumah tangga** sebagai berikut : hitung jumlah rumah tangga yang mengalami kenaikan = total KK $\times$ tingkat adopsi; hitung kenaikan pendapatan per KK = baseline $\times$ persentase kenaikan; hitung total kenaikan pendapatan agregat = (1) $\times$ (2). Perhitungan Numerik (digit-by-digit style) total KK = 516.300. Berdasarkan skenario konservatif (30% adopsi, +10% pendapatan) adopters = $516.300 \times 30\% = 516.300 \times 0,30 = 154.890$ KK ($516.300 \times 0,3 = 154.890$) kenaikan per KK = $\text{Rp } 18.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 18.000.000 \times 0,10 = \text{Rp } 1.800.000$ /tahun. Total kenaikan agregat = $154.890 \times \text{Rp } 1.800.000 = (154.890 \times 1.800.000) = \text{Rp } 278.802.000.000$ (Dua ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus dua juta rupiah). Skenario Moderat (60% adopsi, +20%

pendapatan) adopters = $516.300 \times 0,60 = 309.780$ KK. Kenaikan per KK = $18.000.000 \times 0,20 = \text{Rp } 3.600.000$ /tahun. Total kenaikan = $309.780 \times 3.600.000 = \text{Rp } 1.115.208.000.000$ (Satu triliun seratus lima belas miliar dua ratus delapan juta rupiah). Skenario optimis (90% adopsi, +35% pendapatan) adopters = $516.300 \times 0,90 = 464.670$ KK. Kenaikan per KK = $18.000.000 \times 0,35 = \text{Rp } 6.300.000$ /tahun. Total kenaikan = $464.670 \times 6.300.000 = \text{Rp } 2.927.421.000.000$ (Dua triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh satu juta rupiah). Dengan skenario agresif (95% adopsi, +40% pendapatan) adopters = $516.300 \times 0,95 = 490.485$ KK. Kenaikan per KK = $18.000.000 \times 0,4 = \text{Rp } 7.200.000$ /tahun. Total kenaikan = $490.485 \times 7.200.000 = \text{Rp } 3.531.492.000.000$ (Tiga Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah). Berdasarkan Perhitungan Perubahan **Nilai Tukar Petani (NTP)** $\text{NTP} = (\text{Indeks Harga yang Diterima Petani} / \text{Indeks Harga yang Dibayar Petani}) \times 100$. Asumsi awal: indeks harga diterima = 100. Indeks harga dibayar = 100 $\rightarrow \text{NTP} = (100 / 100) \times 100 = 100$. Dampak koperasi (ilustrasi): koperasi menaikkan harga jual petani ke pasar sebesar +12%, dan menurunkan harga input (pupuk/pakan) yang dibeli petani sebesar -8%. Perhitungan Numerik (digit-by-digit style) : harga diterima baru = $100 \times (1 + 0,12) = 100 \times 1,12 = 112$; Harga dibayar baru = $100 \times (1 - 0,08) = 100 \times 0,92 = 92$; NTP baru = $(112 / 92) \times 100 = (1,2173913043478262) \times 100 \approx 121,739... \rightarrow$ dibulatkan 121,74. Perubahan NTP = $121,74 - 100 = +21,74$ poin $\approx +21,74\%$ relatif terhadap baseline. Interpretasinya adalah bahwa kenaikan NTP dari 100 ke $\sim 121,7$ menandakan peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani akibat harga jual lebih baik dan biaya input lebih rendah. Ini adalah ilustrasi; angka sebenarnya harus dihitung dengan indeks harga riil lokal.

Berkurangnya ketergantungan pada **ijon, tengkulak dan rentenir**. Asumsi ilustratifnya; rata-rata produksi per rumah tangga (contoh): 1.000 kg/ tahun (mis. padi/komoditas tertentu).

Harga konsumen rata-rata = Rp 7.000/kg. Skema baseline: petani menerima 60% dari harga konsumen (sisanya untuk tengkulak/antara: 40%). Skema koperasi: setelah terbentuk gerai & rantai pendek, petani menerima 85% dari harga konsumen (tengkulak tinggal 15%). Perhitungan per rumah tangga : *Farmer income baseline* = $1.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 7.000 \times 60\% = 1.000 \times 7.000 \times 0,6 = 7.000.000 \times 0,6 = \text{Rp } 4.200.000$ /tahun; *Farmer income* dengan koperasi = $1.000 \times 7.000 \times 85\% = 7.000.000 \times 0,85 = \text{Rp } 5.950.000$ /tahun. Kenaikan pendapatan petani per KK akibat berkurangnya tengkulak = $5.950.000 - 4.200.000 = \text{Rp } 1.750.000$ /tahun. Perhitungan per rumah tangga Agregat dampak (misal diterapkan pada 154.890 KK yang mengadopsi-skenario konservatif dari bagian A). Total tambahan pendapatan = $154.890 \times 1.750.000 = 154.890 \times 1.750.000 = 154.890 \times 1.75e6 = \text{Rp } 271.057.500.000$ (dua ratus tujuh puluh satu miliar lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Interpretasinya ialah bahwa pergeseran pembagian harga terhadap petani meningkatkan pendapatan langsung dan menurunkan peran tengkulak. Selain pendapatan, efek positif lain yaitu stabilitas harga lokal, pasokan lebih terorganisir (*cold-storage*, logistik), dan kapasitas pemasaran. Dampak kenaikan pendapatan agregat tahunan (ilustratif) konservatif : Rp.278,8 milyar; moderat: Rp 1.115,2 triliun; optimis: Rp 2.927,4 triliun; agresif : Rp 3.531,4 triliun. Contoh perubahan NTP (dengan +12% harga jual & -8% biaya input) : NTP naik ~21,7 poin (dari 100 → 121,74). Perubahan NTP : contoh perubahan NTP (dengan +12% harga jual & -8% biaya input) : NTP naik ~21,7 poin (dari 100 → 121,74). Berkurangnya ketergantungan pada tengkulak. Contoh pengurangan peran tengkulak (petani menerima 60% → 85%) : tambahan Rp.1.750.000/KK/tahun (dengan asumsi produksi 1.000 kg/KK/tahun).

Dengan asumsi utama baseline PDRB NTT (harga berlaku, tahun acuan terakhir BPS) : Rp 128,522 triliun. Dampak aglomerat kenaikan pendapatan dari program koperasi

dengan skenario konservatif = **Rp.278.802.000.000 = Rp.0,278802 triliun**. Dengan skenario moderat = **Rp.1.115.208.000.000=Rp.1.115.208 triliun**. Dengan skenario optimis =**Rp.2.927.421.000.000 = Rp 2,927421 triliun**. Dengan skenario agresif = **Rp. 3.531.492.000.000 = Rp. 3,531492 triliun**. Metode/rumus singkatnya : kontribusi absolut terhadap PDRB (Rp) = tambahan pendapatan agregat (Rp). Kontribusi relatif (%) terhadap PDRB = (tambahan pendapatan/PDRB baseline) $\times$ 100. Kontribusi dalam persentase poin terhadap pertumbuhan tahunan = kontribusi relatif (%) yang menunjukkan berapa persentase poin pertumbuhan nominal PDRB yang bisa disumbangkan oleh tambahan pendapatan tersebut (asumsi: semua tambahan dikenakan sebagai output yang masuk ke perhitungan PDRB pada tahun target dan tidak dikeluarkan oleh faktor lain). Perhitungan Numerik (digit-by-digit style) : konversi baseline ke triliun (untuk kemudahan) PDRB baseline = Rp 128.522,85 miliar = 128.522,85 miliar = Rp 128,52285 triliun. Skenario konservatif : tambahan = Rp 278.802.000.000 = 0,278802 triliun. Persentase terhadap PDRB=(0,278802/128,52285) $\times$ 100 = 0,002168... $\times$ 100 $\approx$ 0,2168% $\rightarrow$ Kontribusi $\approx$ +0,217 persentase poin terhadap PDRB nominal (harga berlaku). Skenario moderat : Tambahan = Rp 1.115.208.000.000 = 1,115208 triliun. Persentase terhadap PDRB = (1,115208/128,52285) $\times$ 100 = 0,008678... $\times$ 100 $\approx$ 0,8678% $\rightarrow$ Kontribusi $\approx$ +0,868 persentase poin terhadap PDRB nominal. Skenario optimis : Tambahan = Rp 2.927.421.000.000 = 2,927421 triliun. Persentase terhadap PDRB = (2,927421 / 128,52285) $\times$ 100 = 0,02278... $\times$ 100 $\approx$ 2,278% $\rightarrow$ Kontribusi $\approx$ +2,278 persentase poin terhadap PDRB nominal. Skenario agresif : tambahan = Rp 3.531.492.000.000 = 3,531492 triliun. Persentase terhadap PDRB = (3,531492 / 128,52285) $\times$ 100 = 0,02747... $\times$ 100 $\approx$ 2,747% $\rightarrow$ Kontribusi $\approx$ +2,747 persentase poin terhadap PDRB nominal. Interpretasinya ialah jika PDRB NTT (harga berlaku) baseline adalah Rp 128,52285 triliun, maka skenario konservatif

menambah $\sim 0,22\%$ pada level PDRB ($\approx +0,22$ pp kontribusi pada laju pertumbuhan nominal). Skenario moderat menambah $\sim 0,87\%$ pada level PDRB ($\approx +0,87$ pp kontribusi). Skenario optimis menambah $\sim 2,28\%$ pada level PDRB ($\approx +2,28$ pp kontribusi). Skenario agresif menambah $\sim 2,74\%$ pada level PDRB ($\approx +2,74$ pp kontribusi). Artinya : bila, misalnya, proyeksi pertumbuhan nominal NTT untuk 2026 tanpa program adalah $+3,0\%$ (contoh) maka dengan skenario moderat dan agresif asumsi semua tambahan masuk pada 2026, pertumbuhan nominal bisa menjadi sekitar $\sim 3,0\% + 0,87 \text{ pp} = 3,87\%$ (angka akhir harus disesuaikan dengan proyeksi dasar yang sebenarnya) maka nominal bisa menjadi $\sim 3,0\% + 2,74 \text{ pp} = 5,74\%$. Sekali lagi kalkulasi-kalkulasi di atas adalah analisis sederhana untuk kemudian dilengkapi atau bisa saja dikoreksi, silahkan dan terima kasih untuk itu.

Kembali pada analisis di atas, apa peringatannya?. Sejauh desain KDMP/KKMP ditaati dan dikerjakan dengan baik. Bagaimana menegakkan prinsip-prinsip koperasi, kapasitas pengurus, pengawas, pengelola, anggota, kelembagaan dan tata kelola, kepemilikan bidang usaha dan kesesuaiannya dengan potensi, karakter dan masalah, kepemilikan modal sendiri, alternatif pinjaman untuk pendanaan dan tujuh gerai yang dianjurkan. Hal lain, teknis operasional, yang sedang berlangsung saat ini dan memerlukan perhatian adalah bagaimana upaya percepatan pengisian *microsite*, Sistem Informasi Manajemen KDMP/KKMP, berfungsi dengan baiknya apa yang disebut Project Manager Officer (PMO) dan Business Assistant (BA) sebagai unsur pendukung teknis KDMP/KKMP.

Koperasi, sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di NTT?; tidak hanya dijelaskan dengan unit kelembagaan dan

materinya tetapi juga dua hal penting : histori dan literasi. Dikembangkan/lebih berkembang?. Pasti, dalam arti sempit oleh koperasi itu sendiri dan dalam arti luas termasuk oleh pemerintah, masyarakat, swasta, dunia usaha. Di luar kalkulasi ekonomis, koperasi relevan dalam mengatasi kesenjangan. Apakah menghalangi pencapaian prinsip optimum?. Seharusnya tidak karena adanya prinsip demokratis di dalam lembaga ini.

Curriculum Vitae; Jusuf Lery Rupidara (Lery), lahir di Ringgou Rote dari Ibu Martha Adu dan Bapak Anderias Rupidara kejadian Pandie. SD, SMP di Baa Rote, SMAN 3 Kupang, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Pemerintahan, Doktor Ilmu Pemerintahan. Karier : Biro Pemerintahan Setda Prov NTT, Pengasuh Praja APDN Nasional Kementerian Dalam Negeri di Jatinangor Jawa Barat; Bappeda Provinsi NTT. Eselon : IV di Bappeda, Dinas PMD, Biro AP; eselon III : Badan Pengelola Perbatasan Daerah NTT, Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi NTT; Balitbangda Provinsi NTT, Eselon II : Biro Kerja Sama, Biro Ekonomi dan Kerja Sama; Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Plt Asisten Sekda Provinsi NTT Bidang Perekonomian dan Pembangunan; Pejabat Bupati Sumba Tengah; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT. Pengajar tidak tetap pada perguruan tinggi di Kota Kupang, penulis pada beberapa media. Beristeri dan tiga anak. Tempat tinggal : Jalan Kebun Raja Naikoten 1 Kupang.

